

Mengapa Orang Kurdi Tidak Memiliki Negara Sendiri?

Oleh: Yappi Manafe

Alumnus Fakultas Hukum, Universitas Kristen Satya Wacana, 1982

Sejarah Singkat Orang Kurdi

Bahasa dan budaya Kurdi mulai berkembang selama zaman es keempat (20.000–15.000 SM). Historiografi pertama kali menyebut Kurdi sebagai kelompok etnis dalam kaitannya dengan bangsa Hurri (3.000–2.000 SM), oleh karena itu diasumsikan bahwa para pendahulu orang Kurdi, bangsa Hurri, hidup dalam konfederasi suku dan kerajaan bersama dengan bangsa Mitanni, keturunan bangsa Hurri, bangsa Nairi, bangsa Urartu, dan bangsa Media. Struktur-struktur politik ini telah memiliki ciri-ciri dasar seperti negara. Pada masa itu, struktur sosial patriarkal belum terlalu menonjol, baik dalam masyarakat pertanian Neolitik maupun dalam struktur sosial Kurdi. Perempuan memiliki posisi yang menonjol, yang juga terlihat dalam revolusi Neolitik. Zoroastrianisme secara langgeng mengubah cara berpikir Kurdi pada masa antara 700 dan 550 SM. Zoroastrianisme mengembangkan suatu cara hidup yang ditandai oleh pekerjaan di ladang, di mana laki-laki dan perempuan berada pada kedudukan yang setara. Cinta terhadap hewan memiliki posisi penting dan kebebasan merupakan nilai moral yang tinggi. Kebudayaan Zoroaster juga memengaruhi peradaban Timur dan Barat, karena baik Persia maupun Hellenes mengadopsi banyak pengaruh budaya ini. Peradaban Persia, didirikan oleh bangsa Media, yang diyakini termasuk dalam kelompok pendahulu orang Kurdi. Dalam tulisan sejarawan Herodotus, terdapat banyak bukti mengenai pembagian kekuasaan di antara kedua kelompok etnis tersebut di dalam Kekaisaran Persia. Hal ini juga berlaku bagi Kekaisaran Sasaniyah^(*) yang muncul kemudian.

Selama zaman klasik, era Hellenik meninggalkan jejak yang mendalam di belahan timur. Kepangeranan Abgar di Urfa dan Kommagene, yang pusatnya berada di dekat Adiyaman-Samsat, serta kerajaan Palmyra di Suriah sangat dipengaruhi oleh bangsa Yunani. Pertemuan budaya khusus ini berlangsung sampai Palmyra ditaklukkan oleh Kekaisaran Romawi pada tahun 269 M, yang membawa konsekuensi negatif jangka panjang bagi perkembangan seluruh kawasan. Munculnya Kekaisaran Sasaniyah juga tidak mengakhiri pengaruh Kurdi. Selama masa ini (216–652 M) struktur feodal terbentuk di Kurdistan. Dengan munculnya feodalisme, kohesi etnis mulai mengalami kemunduran. Masyarakat Kurdi semakin mengembangkan ikatan yang terstruktur secara feodal. Perkembangan menuju peradaban feodal ini secara berkelanjutan berkontribusi pada revolusi Islam. Islam diarahkan melawan struktur pemilik budak dan mengubah hubungan etnis selama masa urbanisasi. Pada saat yang sama, Islam merevolusi masyarakat feodal secara mental dan memberikan dasar ideologis kepada mereka. Kemunduran Kekaisaran Sasaniyah (650 M) membantu Islam menciptakan aristokrasi feodal Kurdi, yang sangat dipengaruhi oleh Arabisasi. Aristokrasi ini menjadi salah satu formasi sosial dan politik terkuat pada masanya. Dinasti Kurdi Ayyubiyah (1175–1250 M) berkembang menjadi salah satu dinasti paling kuat di Timur Tengah, yang memberikan pengaruh besar terhadap orang Kurdi. Di sisi lain, orang Kurdi mempertahankan hubungan dekat dengan Kesultanan Seljuk^(@), yang mengambil alih kekuasaan dari Abbasiyah pada tahun 1055.

Dinasti-dinasti keturunan Kurdi seperti Shaddadid, Buyid, dan Marwanid (990–1090) berkembang menjadi negara-negara kecil feodal. Kepangeranan-kepangeranan lainnya kemudian menyusul. Kelas penguasa Kurdi menikmati otonomi yang besar dalam Kekaisaran Utsmaniyah^(**). Orang Kurdi dewasa ini, yang jumlahnya diperkirakan sekitar 35 - 45 juta jiwa, terus berjuang untuk memperoleh pengakuan politik dan hak-hak sebagai komunitas nasional di dalam batas-batas negara tempat mereka berada. Mereka merupakan komunitas etnis terbesar di Timur Tengah yang tidak memiliki negara sendiri. Orang Kurdi jauh kurang beruntung dibandingkan dengan komunitas etnis lainnya di kawasan tersebut.

Nasionalisme etnis merupakan produk pemikiran Eropa abad ke-19 dan pada awalnya sangat asing bagi masyarakat tradisional Timur Tengah; masyarakat tersebut lebih didasarkan pada identitas keagamaan dan kesetiaan kepada Sultan (Turkye Utsmani) atau Shah (Iran). Namun, kekuatan politik dan ekonomi Eropa menyebabkan penyebaran gagasan-gagasan tersebut secara cepat hampir tidak dapat dihindari. Komunitas yang paling responsif adalah kaum Kristen dan Yahudi, yang telah memiliki hubungan keagamaan yang membuat nilai-nilai Eropa menarik bagi mereka. Kaum Muslim membutuhkan waktu lebih lama. Kelompok responsif lainnya adalah kalangan intelektual yang berbasis di kota-kota, yang menyadari kelemahan relatif negara-negara Timur Tengah serta kurangnya perkembangan pemikiran intelektual. Kelompok terakhir ini telah memiliki tradisi literatur sendiri, terutama bangsa Arab (di Beirut, Kairo, dan Damaskus) dan bangsa Turkye Utsmani di Istanbul. Para intelektual ini mulai memandang diri mereka dengan cara yang baru, berdasarkan garis etnis dan bukan semata-mata agama. Pada saat Kekaisaran Utsmani mengalami keruntuhan, banyak dari para intelektual tersebut telah membentuk gerakan-gerakan nasionalis yang mampu memanfaatkan terbentuknya negara-negara modern, terutama di bawah pengaruh dan perlindungan Eropa.

Bangsa Kurdi merupakan pengecualian yang paling menonjol. Mengapa mereka gagal? Wajar jika bangsa Kurdi menyalahkan negara-negara besar (*“Great Powers”*) dan negara-negara represif di kawasan atas kegagalan tersebut, dan tentu saja semuanya harus memikul sebagian tanggung jawab karena persoalan Kurdi hingga kini masih belum terselesaikan. Namun, pada saat yang sangat menentukan ini, ketika terdapat peluang untuk membentuk negara, masyarakat Kurdi sama sekali belum siap untuk memanfaatkannya. Masyarakat Kurdi masih bersifat pedesaan, sangat terdesentralisasi, sebagian besar berbasis kesukuan, dan tidak memiliki kepemimpinan intelektual perkotaan seperti yang dimiliki oleh bangsa Arab dan Turki.

Pembentukan suatu gerakan etnis yang koheren dan kohesif akan menjadi tugas setidaknya selama satu generasi. Gerakan-gerakan nasional yang koheren dengan tujuan yang relatif jelas kemudian muncul di Iran, Irak, dan Turkye, tetapi perkembangannya berlangsung lambat dan penuh penderitaan. Persaingan antara satu suku dan suku lainnya, antara kiri dan kanan, antara Kurdi pedesaan dan Kurdi perkotaan, antara Sunni dan non-Sunni, antara satu partai dan partai lainnya, serta antara satu wilayah dan wilayah lainnya, semuanya menghambat tercapainya keberhasilan perjuangan Kurdi. Selain itu, pemerintah dan negara-negara tetangga telah mahir mengkooptasi satu kelompok untuk menghadapi kelompok lainnya, sehingga semakin memperlambat terbentuknya suatu bangsa Kurdi.

Siapakah Orang Kurdi?

Orang Kurdi adalah keturunan suku-suku Indo-Eropa yang menetap di antara penduduk asli Pegunungan Zagros^{#)} pada berbagai periode, tetapi kemungkinan besar terutama selama milenium kedua SM (Sebelum Masehi). Penyebutan pertama tentang orang Kurdi, sebagai Cyrtii, muncul pada abad kedua SM. Namun, istilah Cyrtii tampaknya tidak menunjukkan suatu kelompok etnis. Pada masa penaklukan Arab pada abad ketujuh Masehi, istilah Kurd digunakan untuk menyebut orang-orang nomaden. Oleh karena itu, istilah tersebut memiliki makna sosial-ekonomi, bukan makna etnis. Tidak diragukan bahwa sejumlah suku Arab, Armenia, Asyur, dan Persia (dan kemudian Turkmen) menjadi orang Kurdi dalam hal budaya dan bahasa. Dengan demikian, identitas etnis tidak menunjukkan satu asal-usul rasial tunggal.

Ada sedikit keraguan bahwa, khususnya di wilayah-wilayah pinggiran Kurdistan, komunitas-komunitas Kurdi berbaur dengan kelompok-kelompok lain; sebagian terserap ke dalam budaya yang dominan di wilayah pinggiran tersebut, sementara yang lainnya terserap ke dalam identitas Kurdi. Di sekitar Arbil, misalnya, bahasa Kurdi menggantikan bahasa Arab di antara penduduk yang beragam. Identitas juga berkaitan dengan garis keturunan. Bagi keluarga-keluarga Kurdi yang religius dan keluarga-keluarga bangsawan, prestise melekat pada keturunan dari Nabi, yang secara implisit menunjukkan garis keturunan Arab.

Orang Kurdi secara tradisional dianggap sebagai orang Iran dan berasal dari Iran, dan oleh karena itu sebagai bagian dari rumpun Indo-Eropa, terutama karena mereka berbicara dalam bahasa-bahasa Iranik. Hipotesis ini sebagian besar didasarkan pada pertimbangan linguistik terutama dikembangkan oleh para ahli linguistik. Berbeda dengan keyakinan tersebut, penelitian DNA⁽⁺⁾ terbaru dalam bidang Antropologi Manusia menunjukkan bahwa, berdasarkan asal-usul paling awal yang dapat ditelusuri, para leluhur orang Kurdi tampaknya merupakan keturunan penduduk pribumi (pertama) Neolitikum di wilayah "*Northern Fertile Crescent*" (wilayah subur di daerah bulan sabit, mencakup Turkye bagian Tenggara, Suriah bagian Utara, Irak bagian Utara, dan sebagian Iran bagian Barat) yang secara geografis terutama berasal dari wilayah di luar dan sebelah barat laut wilayah yang sekarang menjadi Iran. Para leluhur tertua orang Kurdi tersebut, beberapa milenium kemudian, mengalami proses "Iranisasi" secara linguistik dalam beberapa gelombang oleh kelompok-kelompok elite imigran dari Asia Tengah yang terorganisasi secara militer dan membawa garis keturunan. Sejarah independen bangsa Kurdi tidak pernah ditulis karena bangsa Kurdi tidak pernah memiliki negara-kekaisaran sejak ilmu sejarah mulai berkembang. Narasi-narasi besar tentang sejarah menceritakan kekaisaran-kekaisaran besar. Bangsa Kurdi, yang tidak memiliki kekaisaran maupun negara, telah dihilangkan dari narasi historiografi klasik dan modern atau direduksi sebagai bagian dari bangsa lain, seperti Iran. Dalam sejarah pra-Islam, sejarah dimonopoli oleh Raja yang menentukan apa yang akan tetap berada dalam ingatan sejarah dan bagaimana peristiwa itu terjadi. Pada masa Islam, para sejarawan juga merupakan juru tulis istana kerajaan yang tidak memiliki kepentingan terhadap historiografi bangsa-bangsa yang tidak memiliki kekaisaran. Lebih jauh lagi, karena sumber historiografi modern, di satu sisi, berasal dari para sejarawan klasik, bangsa Kurdi terus dikecualikan atau direduksi dalam narasi sejarah; dan di sisi lain, subjek utama ilmu-ilmu sosial modern adalah negara, sementara bangsa Kurdi yang tidak memiliki negara tidak memperoleh perhatian yang memadai sebagai objek penelitian.

Selain itu, para sejarawan Kurdi tidak mampu mendekonstruksi kerangka yang telah dibangun oleh pihak lain untuk menulis sejarah independen bangsa Kurdi. Karena alasan ini, sejarah Kurdi masih merupakan sesuatu yang baru dan belum banyak diketahui, dan ketiadaan narasi tidak berarti bahwa sejarah itu sendiri tidak ada. Banyak gerakan politik dan sosial yang anti-Islam dan anti-Iran merupakan gerakan yang dilakukan oleh orang-orang Kurdi. Namun, dalam narasi sejarah, mereka disebut sebagai orang-orang jahat, Zandiq dan kafir, bukan sebagai suatu kelompok etnis. Demikian pula, pada masa kini, penindasan dan genosida terhadap orang Kurdi tidak dilakukan atas nama “Kurdi”, tetapi atas nama terorisme, orang-orang kafir, Marxisme, dan kaum separatis. Sejarah Kurdi adalah sejarah rakyat, bukan sejarah aristokrasi dan kekaisaran.

Identitas Kurdi dan Pembentukan Masyarakat

Sejak awal abad - 19, perjuangan antara orang-orang Kurdi dan negara menjadi jauh lebih kompleks. Negara-negara regional belajar bahwa, sementara mereka bersaing dengan negara-negara tetangga mereka, ada manfaat juga untuk bekerja sama dengan mereka guna menjaga agar kekuatan-kekuatan kesukuan, yang kebetulan adalah orang-orang Kurdi, tetap ditundukkan. Mengobarkan kerusuhan di antara suku-suku tetangga yang menjadi saingan, sering kali dapat memberikan keuntungan. Selain itu, negara-negara Kekuatan Besar mulai melakukan intervensi dalam urusan regional. Perhatian utama mereka adalah memperoleh dominasi strategis terhadap kekuatan-kekuatan besar lain yang berkepentingan, dengan membangun aliansi baik dengan negara-negara regional maupun dengan kelompok-kelompok yang dapat disebut sebagai kelompok sub-negara, di antaranya orang-orang Kurdi, merupakan yang paling menonjol, yang dapat berguna sebagai alat untuk mencapai tujuan. Aturan-aturan yang tegas menentukan perilaku mereka: kepentingan vital mereka sendiri selalu didahulukan, dan mereka akan meninggalkan sekutu-sekutu regional, baik pada tingkat negara maupun sub-negara, jika hal tersebut sesuai dengan kepentingan mereka. Negara-negara regional juga akan meninggalkan satu Kekuatan Besar untuk beralih kepada Kekuatan Besar lainnya, ketika hal tersebut sesuai dengan kepentingannya. Para pemain sub-negara mungkin mencoba memainkan permainan yang sama, tetapi kartu yang mereka miliki untuk dimainkan lebih sedikit dan nilainya relatif rendah. Inilah pengalaman yang berulang kali dialami oleh orang-orang Kurdi. Mereka dapat berkembang untuk sementara waktu, ketika negara dan kekuatan-kekuatan besar sedang teralihkan perhatiannya ke tempat lain, tetapi pada akhirnya selalu tiba saat perhitungan, ketika kekuasaan negara sekali lagi ditegakkan (runtuhnya dengan cepat upaya Kurdistan Irak untuk memperoleh kemerdekaan pada tahun 2017 merupakan kasus terbaru yang menunjukkan hal tersebut). Inilah sebabnya dorongan untuk membentuk suatu entitas Kurdi yang merdeka tetap ditakdirkan untuk mengalami kekecewaan, kecuali jika, karena alasan-alasan yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya, negara-negara regional berkehendak untuk mengizinkannya. Lapisan kompleksitas lebih lanjut ditambahkan pada abad kedua puluh melalui penerapan gagasan-gagasan modern mengenai identitas etnis oleh negara-negara yang baru muncul, yang menyangkal atau meremehkan kedudukan orang-orang Kurdi di dalam negara-negara tersebut. Berkaitan dengan perjuangan orang-orang Kurdi untuk beralih dari sekadar menjadi suatu masyarakat yang kebetulan memiliki atribut-atribut yang secara umum disebut sebagai “Kurdi” menjadi suatu komunitas yang koheren dengan karakteristik esensial suatu bangsa, hanya terdapat sedikit bukti bahwa orang-orang Kurdi mana pun berpikir dalam kerangka keseluruhan masyarakat Kurdi hingga tahun-tahun terakhir abad kesembilan belas.

Tidak ada keraguan bahwa suatu masyarakat Kurdi telah ada sebagai suatu kelompok yang dapat diidentifikasi secara kultural selama mungkin lebih dari dua ribu tahun, tetapi baru pada tahun-tahun awal abad kedua puluh mereka memperoleh suatu kesadaran politik sebagai suatu komunitas Kurdi. Kesadaran akan komunitas nasional ini muncul kurang lebih pada waktu yang sama ketika orang-orang Turkye dan Arab juga mulai menerima suatu kesadaran identitas etnis sebagai pengganti dua bentuk dasar solidaritas sebelumnya – gagasan mengenai kewarganegaraan Ottoman dan keanggotaan dalam suatu komunitas agama atau “millet” (kelompok masyarakat yang diorganisasikan berdasarkan agama/keyakinan). Di Turkye dan Iran, millet, yang dahulu menunjukkan identitas agama, pada abad kedua puluh menjadi istilah yang berarti bangsa. Akibatnya, orang-orang Kurdi mendefinisikan kembali diri mereka dalam kerangka etnisitas mendapati diri mereka bersaing dengan negara-negara yang bertekad membentuk suatu identitas baru yang mereka rasakan menyangkal identitas mereka sendiri. Berbeda dengan orang-orang Turkye dan Arab, orang-orang Kurdi berada dalam posisi yang sangat tidak menguntungkan karena mereka, sebagai masyarakat yang terutama berbasis suku atau klan, tidak memiliki budaya kewargaan dan suatu sistem yang mapan. Hal ini, tentu saja, merupakan konsekuensi dari kehidupan di daerah “peripheral” (daerah pinggiran). Akibatnya, mereka tidak memiliki kebiasaan berpikir yang diperlukan untuk membangun suatu masyarakat yang didasarkan pada identitas etnis. Dalam kasus Turkye modern, identitas baru tersebut disebut “Turkye”, yang secara ideologis didefinisikan sebagai mereka yang, meskipun tidak harus berasal dari etnis Turkye, tetap dianggap sebagai orang Turkye karena pengkondisian sosial. Di Iran, orang-orang Kurdi mendapati diri mereka berada dalam situasi yang lebih kompleks, karena negara Iran hanya sekitar 50 persen Persia, sedangkan sisanya merupakan mosaik orang Azeri-Turkye, Kurdi, Arab, Baluch, Lur, Turkoman dan kelompok-kelompok kecil lainnya. Namun bahasa Persia diberlakukan sebagai bahasa pemersatu bagi semua “orang Iran”. Berbeda dengan Turkye, tidak ada penyangkalan terhadap identitas Kurdi, melainkan hanya desakan agar identitas tersebut ditempatkan di bawah ideologi homogenisasi integrasi nasional Iran. Dalam konteks ini, perbedaan agama – orang-orang Kurdi sebagian besar Sunni, sementara orang-orang Iran sekitar 85 persen adalah Syi’ah – tetap menjadi komponen penting dari kekhasan Kurdi, yang menandai mereka sebagai orang luar dalam kesadaran dan narasi nasional Iran. Di Irak dan Suriah modern, orang-orang Kurdi harus bergiat dalam iklim politik yang sejak awal sangat bercorak Arab dan yang secara progresif bergerak menuju nasionalisme Arab sebagai suatu ideologi yang, “in extremis”, menganggap orang-orang Kurdi sebagai penghuni bagian dari warisan Arab.

Apakah orang-orang Kurdi merupakan suatu bangsa? Jika ya, bagaimana bangsa ini terbentuk? Apa karakteristik yang membedakan suatu bangsa dari suatu kategori etnis – orang-orang tertentu yang kebetulan memiliki leluhur, bahasa atau budaya yang sama – atau bahkan dari suatu komunitas etnis – orang-orang yang berpikir dan bertindak sebagai orang Kurdi, bukan berdasarkan gagasan-gagasan keagamaan, sosial atau politik mengenai solidaritas?. Persoalan-persoalan semacam itu menimbulkan pertanyaan-pertanyaan sulit bagi suatu komunitas yang hingga kini masih belum memperoleh pengakuan internasional sebagai suatu bangsa dalam suatu wilayah yang diakui. Orang mungkin berpendapat bahwa karakteristik esensial dari kebangsaan mencakup lembaga-lembaga bersama, seperangkat hak dan kewajiban yang diakui secara luas bagi seluruh anggota komunitas, suatu budaya bersama dan suatu ideologi kewargaan, dan mungkin aspirasi serta persepsi bersama untuk mengikat mereka dalam suatu tanah air yang diakui.

Sulit untuk berpendapat bahwa mereka yang menyebut diri mereka sebagai orang Kurdi memiliki kesamaan-kesamaan tersebut. Banyak orang Kurdi di seluruh sistem negara modern tentu memiliki perasaan solidaritas, yang pada awalnya didasarkan pada gagasan tentang leluhur bersama (yang mungkin bersifat fiktif). Ukuran lain dari kesamaan tersebut adalah bahasa yang digunakan bersama. Di sini orang-orang Kurdi menghadapi tiga kesulitan praktis: perbedaan bahasa yang signifikan, penciptaan literatur yang masih sangat baru (sejak tahun 1920-an), dan penggunaan aksara yang berbeda-beda: Latin di Turkeye, Sirilik di bekas Uni Soviet, dan Persia (yang merupakan turunan dari bahasa Arab) di Irak dan Iran. Mereka juga menghadapi dua hal yang bersamaan mengganggu, bahwa sementara orang-orang Iran meremehkan bahasa Kurdi sebagai sekadar sebuah “dialek” bahasa Persia, para ahli bahasa dapat cenderung mengategorikan berbagai bentuk bahasa Kurdi sebagai bahasa-bahasa yang saling berkerabat dan bukan sebagai dialek, yang secara implisit menimbulkan keraguan terhadap kesatuan masyarakat Kurdi. Ada juga persoalan mengenai suatu wilayah bersama yang diakui. Meskipun negara-negara regional mungkin menyangkal keberadaannya, Kurdistan tetap ada dalam batas-batas yang relatif terdefinisi dengan baik dalam pikiran sebagian besar kelompok politik Kurdi.

Perkembangan Politik Regional Kurdi di Era Antar-Perang (1918-1939)

Sejak awal era modern hingga abad-18, kekaisaran-kekaisaran Muslim dan Tiongkok merupakan kekuatan politik dan ekonomi utama di dunia. Jika ditelusuri sejak abad-15, kebangkitan Eropa secara bertahap menggantikan kekaisaran Muslim dan Tiongkok terus berlangsung melalui “perebutan koloni, pasar, dan bahan mentah” selama “puncak kejayaan imperialisisme” dan berujung pada Perang Dunia I. Dari Perang Besar hingga tahun 1930-an, sekitar 90 persen permukaan bumi berada di bawah kendali kekuatan Barat, yang menjadikan kolonialisme Barat modern dan “imperialisisme ekologis” sebagai sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah dunia. Dunia modern yang didominasi Barat telah dibentuk kembali oleh ekonomi dunia dan sistem negara-bangsa, yang telah membawa kehancuran yang tiada bandingannya terhadap umat manusia, flora, dan fauna. Selain dalam bidang politik dan ekonomi, Eropa juga telah menempati posisi sentral dalam historiografi.

Masyarakat non-Eropa dipandang sebagai bangsa-bangsa tanpa sejarah, dan perlawanan mereka dihapus dari halaman-halaman sejarah. Landasan filosofis Eurocentrisme dan kolonialisme Eropa dipersiapkan oleh para filsuf terkemuka seperti Georg W. F. Hegel. Dalam pandangannya, Afrika adalah “tanah anak-anak”; orang-orang Amerindian adalah “jelas-jelas tidak cerdas” dan “anak-anak yang belum tercerahkan”; dan “India tidak memiliki sejarah”. Bagi Hegel (seorang Eurocentris sejati), “kolonialisme tidak hanya dibenarkan tetapi juga diperlukan, sebagai bagian dari proses Eropa selama berabad-abad dalam mewujudkan kebebasan”. Di sisi lain, masyarakat non-Eropa mengembangkan berbagai strategi perlawanan, mulai dari menggubah puisi hingga melakukan pemberontakan bersenjata melawan penjajah Eropa dan para kolaborator lokal mereka. Contoh paling menonjol dari yang terakhir tidak diragukan lagi adalah Revolusi Haiti tahun 1791, pemberontakan budak terbesar dalam sejarah dunia. Kolonialisme Barat modern dan berbagai dampaknya terhadap masyarakat non-Eropa juga telah menerima kritik radikal antara lain dari Du Bois. Perang Dunia I mengakhiri tatanan dinasti, dan memberikan jalan bagi prinsip politik dominan berupa nasionalisme yang menganggap adanya kesesuaian antara yang bersifat politik dan yang bersifat nasional.

Dalam tatanan politik yang baru ini, orang-orang Kurdi hidup di bawah yurisdiksi Turkye, Iran, Irak, Suriah, dan bekas Uni Soviet. Mereka sering dianggap tidak sesuai dengan negara, dan oleh karena itu dianggap sebagai pembuat masalah. Sesuai Mandat Inggris antara tahun 1920 dan 1932, Irak mengakui orang Kurdi sebagai kelompok minoritas etnis. Namun, pilihan Inggris untuk membentuk pemerintahan Arab yang dipilih dari kalangan perwira Sunni dan tokoh-tokoh terkemuka perkotaan mengakibatkan berlanjutnya konflik antara orang Kurdi dan negara. Gerakan nasionalis Kurdi di Suriah dikendalikan secara ketat oleh Mandat Prancis yang pro-Kristen dan sektarian.

Karena memiliki jumlah orang Kurdi paling sedikit, Uni Soviet pada awalnya mendefinisikan orang Kurdi sebagai sebuah “bangsa kecil”, tetapi kemudian mengategorikan mereka sebagai “bangsa musuh”. Turkye dan Iran menonjol karena kesamaan mereka dalam hal kebijakan terhadap orang Kurdi. Kedua negara tersebut memiliki jumlah orang Kurdi terbesar di dalam perbatasan mereka. Di Iran dan Turkye-lah identitas Kurdi disangkal dan paling keras dikenai kebijakan penyangkalan, asimilasi, dan pemukiman kembali secara paksa. Pemberontakan Kurdi paling awal yang memiliki tuntutan nasional dipimpin oleh Sheikh Ubeydullah tahun 1880, pecah di perbatasan Iran dan Kekaisaran Ottoman. Setelah hanya sekali melakukan kunjungan ke luar negeri, yaitu ke Turkye, Reza Shah menjadikan Atatürk sebagai model dalam program modernisasinya. Seperti Mustafa Kemal Atatürk, “Reza Shah sangat sensitif terhadap citra negaranya yang ditampilkan kepada Barat dan daya tarik kaum nomaden yang kuno, eksotis, dan indah bagi para pengunjung Eropa, sangat menggungunya”.

Timur Tengah pada era antar-perang (masa antara Perang Dunia I dan Perang Dunia II, 1918 - 1939) sedang terbentuk bukan hanya secara politik tetapi juga secara ekonomi. Sejak awal abad-19, Timur Tengah telah diintegrasikan ke dalam ekonomi dunia kapitalis industri yang berpusat di Eropa Barat. Timur Tengah secara bertahap terintegrasi ke dalam ekonomi dunia sebagai pemasok bahan mentah dan pengimpor produk industri Barat. Konsesi ekonomi yang diberikan kepada para pedagang Barat berkontribusi terhadap frustrasi para pengrajin dan pedagang lokal, yang pada gilirannya mendorong gerakan-gerakan nasionalis. Munculnya negara-negara bangsa di Timur Tengah menjadikan penyelundupan sebagai kegiatan ekonomi utama dalam konteks masyarakat Kurdi, diperkirakan menempati urutan ketiga setelah pertanian dan peternakan dalam perekonomian Kurdi. Baik orang Kurdi maupun negara-negara yang baru didirikan bukanlah entitas yang homogen dan tetap. Orang Kurdi terbagi berdasarkan garis pedesaan-perkotaan, kelas sosial, gender, bahasa, agama, ideologi, dan kesukuan. Asimilasi mereka secara bertahap ke dalam negara-negara bangsa yang baru didirikan menambahkan lapisan perpecahan lainnya. Demikian pula, tahun-tahun antar-perang merupakan periode ketika perbatasan masih mengalami perubahan. Perbatasan Suriah-Irak berubah ketika wilayah Sinjar yang dihuni orang Kurdi diserahkan kepada Irak berdasarkan kesepakatan Suriah-Irak pada tahun 1933. Periode antar-perang ditandai dengan pemberontakan bersenjata Kurdi di Turkye, Iran, dan Irak. Pemberontakan-pemberontakan ini pada umumnya merupakan gerakan lintas-perbatasan yang paling sering dipimpin dan/atau diorganisasi oleh para syekh, kepala suku, molla, serta para perwira dan kaum intelektual yang berpendidikan Barat. Meskipun demikian, respons Kurdi tidak seharusnya direduksi menjadi pemberontakan

Nasionalisme Kurdi di Turkye, Iran, Irak, Suriah dan bekas Uni Soviet: (1918 – 1939)

Kekuatan-kekuaatan Eropa, negara-negara, dan elite Kurdi bersaing dalam memperebutkan pendefinisian kembali identitas Kurdi (“Kurdishness”). Melalui peribahasa, misalnya, para intelektual Kurdi menyuarakan tuntutan nasionalis dalam jurnal Kurdi-Ottoman Jin pada akhir 1918 dan awal 1919. Di sisi lain, para nasionalis Turki, Iran, dan Irak bersaing untuk mengintegrasikan dan mengindigenisasi (proses menjadikan orang Kurdi ke dalam ideologi nasionalis mereka masing-masing). Sementara di Turkye orang Kurdi disebut sebagai “Orang Turkye Pegunungan” (“Mountain Turks”), di Iran mereka dipandang sebagai “orang Iran yang autentik dan pembela Iran terhadap para penyerbu asing sepanjang sejarah”. Sementara Inggris dan Prancis memandang orang Kurdi sebagai masyarakat kesukuan dan primitif, Uni Soviet secara resmi memasukkan mereka sebagai salah satu dari “bangsa-bangsa yang secara budaya terbelakang” (“culturally backward nations”).

Turkye

Perjanjian Sèvres (Perjanjian Damai yang mengakhiri Perang Dunia I antara Kesultanan Utsmaniyah Turkye dan Blok Sekutu) pada tahun 1920 membagi-bagi wilayah bekas Kekaisaran Ottoman di antara negara-negara Sekutu, dan Perjanjian tersebut menyerukan pembentukan negara Kurdi dan Armenia. Sejak tahun 1919, Mustafa Kemal mengorganisasi Perang Kemerdekaan melawan pendudukan Barat. Bersama dengan Perang Dunia I, Perang Kemerdekaan Turkye mengakhiri keberadaan populasi Yunani dan Armenia di Anatolia. Dalam sebuah wawancara publik segera sebelum proklamasi Republik Turkye pada 29 Oktober 1923, Mustafa Kemal mengatakan:

“Sesuai dengan konstitusi kita, suatu bentuk otonomi lokal akan diberikan. Oleh karena itu, provinsi-provinsi yang dihuni oleh orang Kurdi akan memerintah diri mereka sendiri secara otonom. Majelis Nasional Agung Turkye terdiri atas para anggota parlemen baik dari Kurdi maupun Turkye dan kedua bangsa ini telah menyatukan kepentingan dan nasib mereka”.

Penghapusan kekhalifahan pada tahun 1924 dipandang oleh para tokoh agama Kurdi sebagai “berakhirnya satu-satunya landasan bersama yang masih tersisa antara orang Kurdi dan Turkye”. Setelah itu, sejumlah besar pemberontakan Kurdi terjadi dari tahun 1924 hingga 1938. tercatat bahwa wilayah-wilayah timur berada dalam situasi yang menyerupai perang saudara antara tahun 1924 dan 1938. Tiga momen terpenting adalah tahun 1925 terjadi pemberontakan Sheikh Said, pemberontakan Gunung Ararat 1927–1930, dan “penaklukan” wilayah Dersim pada 1936–1938. Civata Azadi Kurd (Perhimpunan Kebebasan Kurdi) membantu mempersiapkan Pemberontakan Sheikh Said. Pemberontakan tersebut berhasil ditumpas dalam waktu dua bulan dan Sheikh Said serta para pemimpin lainnya digantung di Diyarbakır pada Juni 1925. Sekitar waktu berlangsungnya persidangan mereka, jaksa Ahmet Süreyya Örgoevren menyampaikan kepada Perdana Menteri İsmet İnönü pandangannya mengenai elite politik Kurdi: “merupakan tujuan yang paling suci bagi semangat ini untuk mati dan dibunuh. Oleh karena itu, semua orang berbahaya yang dapat menjadi pemimpin di Kurdistan sama sekali tidak boleh diampuni”. Sementara gelombang besar orang Kurdi dan orang Armenia yang masih tersisa melarikan diri ke Jazira Suriah, ribuan lainnya dipindahkan dan ditempatkan kembali di wilayah-wilayah bagian barat Turkye.

Pemberontakan Gunung Ararat diorganisasi oleh organisasi nasionalis Kurdi Khoybun yang berbasis di Suriah. Berlangsung di perbatasan Turkeye–Iran, pemberontakan tersebut ditumpas melalui operasi militer bersama kedua negara. Dalam memoarnya, presiden kedua Turkeye, İsmet İnönü, menyebut Pemberontakan Gunung Ararat sebagai sebuah “gerakan Kurdistan”. Konfrontasi bersenjata besar ketiga berlangsung di Dersim. Selama operasi militer di Dersim pada 1936–1938, ribuan orang dibantai, sementara ribuan lainnya dipindahkan dan ditempatkan kembali di wilayah-wilayah bagian barat Turkeye. Bersamaan dengan tindakan militernya, negara Turkeye juga berupaya membentuk kembali baik identitas Kurdi maupun identitas Turkeye. Şark Islahat Planı (Rencana Reformasi Timur) disusun beberapa bulan setelah penindasan pemberontakan Sheikh Said. Rencana ini mengajukan berbagai langkah pendidikan, demografis, dan administratif yang luas untuk diterapkan di wilayah-wilayah yang dihuni orang Kurdi. Karena tujuan Turkifikasinya yang komprehensif, Menteri Luar Negeri Turkeye Aras menyampaikan kepada para perwakilan Inggris di Liga Bangsa-Bangsa di Jenewa pada November 1930 mengenai “kemungkinan kolonisasi Turkeye secara intensif di masa depan untuk menenggelamkan orang Kurdi dalam massa pendudukan Turkeye. Selain itu, dalam membangun identitas bangsa Turkeye (Turkishness), bahasa Kurdi dilarang di ruang publik. Republik Kemalis berupaya membangun bangsa Turkeye yang homogen. Masyarakat Sejarah Turkeye (“Turkish Historical Society”) dan Masyarakat Bahasa Turkeye (“Turkish Language Society”) didirikan. Alfabet Latin diterima untuk bahasa Turkeye. Bidang sejarah, antropologi, dan arkeologi juga dikerahkan untuk mempelajari ras, budaya, dan sejarah Turkeye. “Teori Sejarah Turkeye” (“Turkish History Thesis”) dan “Teori Bahasa Matahari” (“Sun-Language Theory”) tampaknya berfungsi untuk mengatasi “kompleks inferioritas” terhadap Barat dengan membuktikan bahwa ras Turkeye adalah pendiri peradaban. Afet İnan merupakan salah satu tokoh terkemuka dalam pengembangan Teori Sejarah Turkeye. Dalam presentasinya yang disampaikan pada Kongres Sejarah Turkeye Pertama yang diselenggarakan pada 2–11 Juli 1932, İnan menyampaikan bahwa: “ras ibu sejati dari bangsa-bangsa beradab” yang tersebar di seluruh dunia adalah “keluarga Turkeye”. Pada masa-masa pemberontakan, identitas Kurdi (“Kurdishness”) dianggap merepresentasikan kebiadaban dan keterbelakangan, berhadapan dengan etnis Turkeye yang dipandang merepresentasikan peradaban dan revolusi. Oleh karena itu, “penyangkalan dan penindasan terhadap identitas etnis Kurdi” dipandang “sebagai suatu kebutuhan nasional dan peradaban”.

Iran

Sejak abad-19 dan seterusnya, Rusia dan Inggris memiliki kepentingan politik dan ekonomi yang begitu kuat di Iran sehingga kemerdekaan Iran “sering kali hanya bersifat formal”. Naiknya Reza Shah ke tampuk kekuasaan pada paruh pertama tahun 1920-an bertepatan dengan periode ketika tidak terdapat otoritas politik yang tersentralisasi. Reza Shah sangat berkomitmen terhadap sentralisasi dan nasionalisme Iran. Gerakan Kurdi yang paling penting di Iran dipimpin oleh Ismail Agha Shikak—dikenal sebagai Simko—yang merupakan kepala Konfederasi suku Shikak. Simko bermaksud membalas dendam atas kematian kakaknya, Jafar Agha, yang “tubuhnya dipotong-potong dan digantung di gerbang garnisun-garnisun militer”. Simko dianggap sebagai pemimpin penting oleh orang Kurdi maupun oleh pemerintah Soviet, Turki, dan Iran. Setelah mendirikan pemerintahan Kurdi yang otonom di wilayah sebelah barat dan selatan Danau Urmieh dari tahun 1918 hingga 1922, Simko mengorganisasi pasukan yang kuat yang beberapa kali mengalahkan pasukan pemerintah (Iran).

Selain dengan otoritas negara Rusia, Kekaisaran Ottoman, dan Iran, Simko terus-menerus berhubungan dengan tokoh-tokoh Kurdi berpengaruh seperti Sheikh Taha, cucu sekaligus penerus Sheikh Ubeydullah. Ia juga bertemu dengan pemimpin Asyur, Mar Shimun, pada tahun 1918 untuk membicarakan operasi bersama di masa depan melawan Turki dan Iran, tetapi pada akhir pertemuan tersebut ia membunuh Mar Shimun dan 150 orang anak buahnya. Tujuan nasionalis Simko dapat dilihat dalam pernyataannya berikut: *“Lihatlah bagaimana bangsa-bangsa kecil di dunia, yang ukurannya tidak sampai seperempat dari ukuran suku-suku Kurdi, telah memperoleh otonomi dari pemerintahan-pemerintahan besar seperti Jerman. Jika bangsa Kurdi yang besar ini tidak memperoleh hak-haknya dari Persia, bangsa ini akan menganggap kematian jauh lebih baik daripada kehidupan, dan apakah pemerintah Persia memberikannya atau tidak, kami akan menjadikan Kurdistan otonom”*. Upaya-upayanya untuk memperoleh kembali kekuasaan tidak membuahkan hasil. Tahun 1929, Simko diundang kembali oleh negara Iran dan dibunuh dalam sebuah penyergapan.

Konfrontasi bersenjata berikutnya adalah Pemberontakan Gunung Ararat yang dipimpin oleh Ihsan Nuri, seorang mantan perwira Ottoman. Organisasi nasionalis Kurdi Khoybun didirikan oleh elite Kurdi “tradisional” dan modern di Beirut pada tahun 1927. Bersama dengan hubungan diplomatiknya dengan aktor-aktor negara dan non-negara, yaitu orang-orang Armenia dan kelompok oposisi Turki di Suriah, Liga Khoybun “menjadi aktor regional yang penting” selama Pemberontakan Gunung Ararat. Pemberontakan Gunung Ararat sangat penting karena perbatasan Turki–Iran saat itu ditarik melalui pertukaran wilayah antara Turki dan Iran untuk memungkinkan pengendalian terhadap para pemberontak. Selain itu, Turki dan Iran bekerja sama untuk memukimkan kembali orang-orang Kurdi yang tinggal di wilayah perbatasan ke daerah-daerah pedalaman sehingga “masalah” lebih lanjut dapat dicegah. Uni Soviet juga menempatkan pasukan di seberang Gunung Ararat untuk memastikan bahwa orang-orang Kurdi tidak menyeberang ke wilayah Rusia. Tidak hanya para pemimpin pemberontakan yang diasingkan dan dipenjarakan, tetapi istri-istri mereka—termasuk istri serta anak-anak mereka juga berada di bawah pengawasan di Iran.

Telah berkembang sejumlah kajian kritis tentang sejarah modern Iran yang melihat pembentukan Iran modern dari wilayah-wilayah pinggiran, mengungkap berbagai manifestasi nasionalisme Iran sebagai proyek rasis, Aryanis, dan Orientalis untuk menundukkan komunitas-komunitas non-Persia kepada nasionalisme Iran yang berpusat pada Persia dan Syiah. Periode Reza Shah menjadi bagian penting dalam pembentukan nasionalisme Iran. Selain modernisasi dan sentralisasi, nasionalisme merupakan salah satu dari tiga tujuan yang menjadi ciri periode Reza Shah. Dalam perspektif ini, “Negara Iran modern mendefinisikan komunitas Persia sebagai bangsa inti etnokultural dan dalam proses ini secara efektif meminggirkan komunitas etnis lainnya di Iran”. Sementara penggunaan bahasa-bahasa minoritas dilarang, pakaian etnis juga dinyatakan ilegal. Gubernur Kermanshah di Kurdistan, misalnya, mengirimkan sebuah instruksi kepada distrik-distrik pada tahun 1936 dan memperingatkan mereka mengenai “kebiasaan buruk” mengenakan cadar di kalangan perempuan perkotaan. Para pejabat pemerintah diminta untuk memastikan bahwa “(perempuan petani Kermanshah) akan terlihat seperti perempuan beradab di dunia” Nasionalisme Reza Shah juga terlihat dalam penerapan “bahasa Persia sebagai bahasa yang seragam dan eksklusif dalam sistem sekolah” dan “perayaan chauvinistik terhadap masa lalu kuno dan kejayaan negara”.

Para elite nasionalis (Iran) juga menjadikan suku-suku, kaum nomaden, dan masyarakat non-Persia sebagai sasaran dalam proyek-proyek mereka untuk membangun peradaban dan bangsa. Mereka memandang kaum nomaden dan suku-suku sebagai “antitesis modernitas” sekaligus “primitif dan simbol keterbelakangan Iran”. Wacana yang menempatkan kaum nomaden, suku-suku, dan orang Kurdi sebagai kekuatan pramodern yang berhadapan dengan modernitas negara menempatkan pihak yang terakhir di luar wacana kekuasaan dan “mengulang kembali mekanisme yang digunakan oleh para pendukung kolonialisme ketika mereka memanfaatkan wacana Pencerahan Eropa untuk membenarkan missions civilisatrices mereka”.

Irak

Sebagai hasil bentukan kolonial Inggris pada tahun 1920, Irak terdiri atas bekas provinsi-provinsi Ottoman, yaitu Mosul, Baghdad, dan Basra. Penduduknya terdiri atas Syiah, Sunni, Kurdi, Yahudi, Turkmen, dan Asyur. Kepentingan imperialis Inggris di Irak diarahkan untuk mengamankan “hubungannya dengan India, jalur udara Kekaisaran, serta perlindungan ladang-ladang minyak Persia dan Irak”. Kolonisasi Inggris atas Irak menghadapi perlawanan sengit. Pemberontakan tahun 1920 ditumpas, mengorbankan biaya manusia dan material yang sangat besar. Irak di bawah Mandat (1920–1932) dipimpin oleh empat komisararis tinggi: Sir Percy Cox, Sir Henry Dobbs, Sir Gilbert Clayton, dan Sir Francis Humphrys. Di bawah Inggris juga terdapat minoritas Arab Sunni. Pemerintahan Irak di bawah mandat hampir seluruhnya terdiri atas orang-orang Arab Sunni, yang jumlahnya kurang dari 25 persen dari keseluruhan penduduk Irak. Inggris memiliki dua posisi yang bertentangan mengenai hak-hak Kurdi: garis resmi London dan posisi para pejabat Inggris di lapangan. Sementara Sekretaris Negara untuk koloni, Winston Churchill, mendukung sebuah negara penyangga Kurdi, Komisararis Tinggi Percy Cox mendukung penggabungan Kurdistan ke dalam negara Irak. Kedua perspektif tersebut sama-sama berkaitan dengan upaya mempertahankan kepentingan imperialis Inggris. Pada tahun 1923, perspektif Cox memenangkan dukungan melalui penggunaan gas beracun dan serangan udara terhadap sasaran-sasaran sipil oleh Angkatan Udara Kerajaan Inggris (Royal Air Force). Pada Januari 1923, Raja Faisal I dan Sir Percy Cox mengakui hak-hak orang Kurdi di dalam batas-batas Irak. Dengan demikian, orang Kurdi secara resmi dan hukum diakui, dan bahasa Kurdi dijadikan bahasa administrasi dan pendidikan. Pernyataan Perdana Menteri ‘Abd al-Muhsin al-Sa’dun berikut pada 21 Januari 1926 menunjukkan tujuan mereka untuk mengintegrasikan orang Kurdi sebagai “unsur Irak”:

“Tuan-tuan! Bangsa ini tidak dapat hidup kecuali jika memberikan kepada semua unsur Irak hak-hak mereka. ... Nasib Turkye harus menjadi pelajaran bagi kita dan kita tidak boleh kembali kepada kebijakan yang dahulu dijalankan oleh Pemerintah Ottoman. Kita harus memberikan hak-hak mereka kepada orang Kurdi. Para pejabat mereka harus berasal dari kalangan mereka sendiri; bahasa mereka harus menjadi bahasa resmi mereka dan anak-anak mereka harus mempelajari bahasa mereka sendiri di sekolah-sekolah. Merupakan kewajiban bagi kita untuk memperlakukan semua unsur, baik Muslim maupun non-Muslim, dengan keadilan dan kewajiban, serta memberikan hak-hak mereka”.

Pertarungan diplomatik mengenai Mosul dalam Konferensi Perdamaian Lausanne (Swiss) yang berlangsung pada 1922–1923 mendorong Turki dan Inggris untuk memanipulasi orang Kurdi “guna memperkuat posisi tawar mereka dalam Konferensi tersebut”.

Komisaris Tinggi Dobbs meminta Turki untuk yakin bahwa “tidak ada dan tidak akan ada persoalan mengenai kemerdekaan Kurdi”. Dobbs menambahkan bahwa orang Kurdi akan memiliki masa depan yang cerah di Irak, yang kemudian terbukti keliru karena pemerintah Inggris dan Irak mengabaikan komitmen yang mereka berikan kepada Liga Bangsa-Bangsa. Terdapat kegelisahan yang kuat di kalangan orang Kurdi mengenai menjadi bagian dari Irak. Dalam referendum tahun 1921, “sebagian besar orang Kurdi Selatan menolak memberikan suara untuk mendukung Faisal I sebagai Raja mereka dan Irak sebagai negara mereka”. Selain itu, literatur nasionalis Kurdi sepanjang abad kedua puluh sebagian besar merujuk kepada Irak sebagai “penjajah Arab” (“an Arab occupier”).

Gubernur Sulaimani pada awal 1930-an (Tawfiq Wahby), menyatakan pada tahun 1931 bahwa Kurdistan Selatan merupakan tanah air historis orang Kurdi, yang tidak pernah menjadi bagian dari tanah Arab dan tidak pernah diperintah oleh orang Arab—bahkan selama periode Kekhalifahan. Ia bersikeras bahwa aneksasi Kurdistan ke Irak adalah ilegal dan tidak dapat dibenarkan. Ia memprotes pengidentifikasian orang Kurdi sebagai orang Irak, dengan menjelaskan bahwa mengidentifikasi mereka sebagai orang Irak sama salahnya dengan mengidentifikasi seorang Irlandia sebagai “orang Inggris”.

Perlawanan Kurdi terhadap Inggris dan Irak juga dilakukan dengan mengangkat senjata. Gerakan politik yang paling penting dipimpin oleh Sheikh Mahmud Barzanji, “pemimpin nasionalis paling berpengaruh di Kurdistan Selatan”. Pada 1 Desember 1918, Pejabat Komisaris Sipil Arnold Wilson bertemu dengan Sheikh Mahmud dan enam puluh kepala suku Kurdi di Sulaymaniya. Wilson mengetahui bahwa mereka hampir sepakat “bahwa orang-orang Turki tidak boleh kembali dan bahwa diperlukan pengakuan umum terhadap perlindungan Inggris”. Sheikh Mahmud kemudian ditunjuk sebagai gubernur wilayah Sulaymaniya. Namun, ketika ia berusaha memperluas kekuasaannya ke Kirkuk dan Kifri, konfrontasi militer terjadi dan Inggris mengalahkan pasukan Kurdi. Sheikh Mahmud disingkirkan oleh Inggris dan diasingkan ke Ceylon (Sri Lanka). Kemudian, sementara para pengikut nasionalisnya membunuh para pejabat Inggris, para tokoh terkemuka Kurdi mengajukan petisi untuk meminta kepulangan mereka. Setelah kerusuhan dan tuntutan terus berlanjut, Sheikh Mahmud dibawa kembali dan ditunjuk sebagai gubernur Kurdistan pada tahun 1922. Ia menyatakan dirinya sebagai raja Kurdistan:

“Mulai hari ini, saya telah mengambil alih kendali negara dan memikul tanggung jawab untuk melindungi kemerdekaan Kurdistan. Harapan saya adalah agar kalian semua bekerja dan berjuang demi mempertahankan hari yang mulia ini dan demi kesejahteraan serta kemajuan bangsa. Orang-orang Kurdi! Sekarang adalah kesempatan kalian untuk bekerja bersama sebagai satu keluarga demi mengonsolidasikan dan melindungi hak-hak nasional yang telah kita menangkan”.

Pemberontakan nasionalis Sheikh Mahmud berlanjut hingga tahun 1932 ketika akhirnya berhasil ditumpas. Pada 1931–1932, Sheikh Ahmad dan saudaranya, Molla Mustafa, juga melakukan pemberontakan, tetapi RAF (Angkatan Udara Kerajaan Inggris) menghancurkan lebih dari separuh rumah di wilayah mereka di Barzan dan mereka terpaksa melarikan diri ke pegunungan.

Setelah mencapai perbatasan Turkye, Sheikh Ahmad ditangkap oleh pasukan Turkye dan beberapa anak buahnya digantung. Mereka akhirnya menyerah, tetapi dipaksa untuk hidup dalam pengasingan internal. Patut dicatat bahwa dalam menumpas pemberontakan-pemberontakan ini, Irak menerima bantuan militer dari Turkye dan Iran.

Inggris menulis kepada Liga Bangsa-Bangsa pada tahun 1930: Meskipun diakui memiliki banyak kualitas yang unggul, orang Kurdi Irak sama sekali tidak memiliki karakteristik kohesi politik yang sangat penting bagi keberhasilan pemerintahan sendiri. Organisasi dan pandangan mereka pada dasarnya bersifat kesukuan. Mereka tidak memiliki tradisi pemerintahan sendiri maupun lembaga-lembaga pemerintahan sendiri. Cara hidup mereka primitif dan sebagian besar dari mereka buta huruf serta tidak terdidik, menentang otoritas dan tidak memiliki rasa disiplin maupun tanggung jawab.

Suriah

Perjanjian rahasia Sykes-Picot mengalokasikan Suriah dan Lebanon kepada Prancis pada tahun 1916. Meskipun demikian, Mandat Prancis dimulai setelah kerajaan Arab Faisal I yang didukung Inggris berakhir pada tahun 1920. Menganggapnya tidak sah, banyak orang Suriah melakukan perlawanan terhadap Prancis melalui demonstrasi, dan serangkaian pemberontakan bersenjata. Pemberontakan Besar 1925–1927 memiliki konsekuensi yang paling menghancurkan. Mandat Prancis pada periode antar-perang dijalankan oleh para Komisaris Tinggi: Jenderal Gouraud, Jenderal Weygand, Jenderal Sarraill, Henry de Jouvenel, Henri Ponsot, Damien de Martel, dan Gabriel Puaux. Di bawah komando para perwira Prancis, orang-orang Afrika Utara, Madagaskar, dan Senegal menyediakan tenaga untuk Armée du Levant (pasukan militer Prancis yang bertugas di wilayah mandat Prancis di Levant, khususnya Suriah dan Lebanon) selama masa PD I dan PD II.

Suriah memiliki populasi yang beragam yang terdiri atas Muslim Sunni, Alawi, Druze, Ismaili, berbagai denominasi Kristen, Yahudi, dan Kurdi. Selain kepentingan politik dan ekonominya, klaim Prancis atas Suriah dan Lebanon didasarkan pada klaim moralnya mengenai misi untuk membudayakan (“mission civilisatrice”), serta sebagai pelindung orang-orang Kristen. Sementara Prancis pada umumnya memiliki pandangan rendah terhadap Muslim Arab, Kurdi, dan Druze, mereka memandang orang-orang Kristen sebagai “lebih cerdas dan berpikiran terbuka”. Dalam menjalankan misi peradabannya, sekutu mereka adalah minoritas Kristen yang secara sosial dan budaya lebih unggul, berhadapan dengan kaum Muslim yang “fanatik”. Sektarianisme Prancis yang pro-Kristen tercermin dalam berbagai catatan sejarah lisan Kurdi yang menyebutnya sebagai “negara Kristen”.

Bekas Uni Soviet

Setelah Revolusi Bolshevik 1917, Rusia menarik diri dari perang dan membatalkan perjanjian-perjanjian rezim sebelumnya dengan pihak Sekutu. Pada periode pascaperang, kepentingan Bolshevik di Timur Tengah terus berlanjut melalui dukungan terhadap perjuangan anti-imperialis.

Selebaran berbahasa Arab milik Lenin yang dibagikan di Aleppo pada tahun 1920, meminta masyarakat Aleppo untuk menerima komunisme dalam perjuangan mereka melawan Prancis. Dengan demikian, “membendung ancaman Bolshevik” menjadi salah satu strategi Inggris di Timur Tengah pascaperang.

Menurut sensus Soviet tahun 1926, terdapat sekitar 70.000 orang Kurdi di bekas Uni Soviet, dan mereka tinggal di republik Armenia, Azerbaijan, dan Georgia. Meskipun mereka tidak memiliki republik atas nama mereka sendiri, terdapat sebuah distrik administratif yang disebut Kurdistan Merah (Red Kurdistan) antara tahun 1923 dan 1929. Kebijakan Soviet mengenai korenizatsiia (menjadikan pribumi berakar secara lokal) secara resmi dimulai pada tahun 1923 dan bertujuan mendorong Sovietisasi kelompok-kelompok nasional non-Rusia dengan mendukung perkembangan nasional mereka dalam kerangka sosialis. Hal ini mencakup dukungan terhadap lembaga-lembaga pendidikan dan kebudayaan dalam bahasa asli mereka, serta kebijakan untuk meningkatkan keanggotaan mereka dalam organ-organ negara dan partai Soviet serta di kalangan pekerja industri. Dalam konteks kebijakan nasionalitas Bolshevik awal, orang Kurdi disebut sebagai “bangsa kecil” (“small nation”) dan didorong “untuk menciptakan bentuk tertulis dari bahasa asli mereka dan mengembangkan pendidikan dalam bahasa ibu mereka”. Sebagai konsekuensinya, dapat ditemukan penerbitan buku-buku pelajaran sekolah dasar Kurdi, kumpulan cerita rakyat, literatur anak-anak, serta surat kabar berbahasa Kurdi dari Republik Armenia yang bernama Riya Teze (Jalan Baru). Pendidikan sekolah dasar diberikan dalam bahasa Kurdi. Kebijakan indigenisasi tersebut kemudian digantikan oleh pembersihan etnis. Orang Kurdi berhenti eksis sebagai bangsa kecil dan menjadi sasaran asimilasi di Azerbaijan dan Armenia Soviet. Orang Kurdi bukan hanya berhenti disebut sebagai “bangsa kecil”, tetapi juga dikategorikan sebagai “bangsa musuh” (“enemy nation”) bersama dengan orang Polandia, Jerman, Finlandia, Estonia, Latvia, Korea, Tiongkok, dan Iran pada 1937–1938.

Tiga faktor, yaitu “xenofobia Soviet (permusuhan terhadap orang asing), kategori wilayah perbatasan, dan politik yang berkaitan dengan imigrasi dan emigrasi”, harus dipertimbangkan dalam perubahan dari “proliferasi etnis” (penyebaran kelompok etnis) menuju “pembersihan etnis”. Pada akhir 1937 lebih dari 1.000 keluarga Kurdi dideportasi, jumlah orang Kurdi yang lebih besar dari Georgia dideportasi ke Kazakhstan dan Asia Tengah pada tahun 1944. Sebuah studi yang membandingkan kebijakan terhadap orang Turkye dan Kurdi di bawah negara-bangsa Bulgaria dan Turkye sejak pendiriannya hingga tahun 1940-an menunjukkan bahwa sementara Turkye bertindak sebagai “negara tanah air” (“homeland state”) bagi orang-orang Turkye di Bulgaria, orang Kurdi tidak memiliki “negara tanah air pelindung” (“protective homeland state”). Orang Kurdi di Kaukasus Soviet tidak hanya tidak memiliki negara tanah air, tetapi juga mengalami pembersihan etnis karena “hubungan etnis lintas batas yang dicurigai” (“suspect cross-border ethnic ties”). Dalam representasi ideologis resmi Soviet, orang Kurdi sering dikaitkan dengan feodalisme, keterbelakangan, buta huruf, fanatisme agama, dan penindasan terhadap perempuan. Pada tahun 1989, pemerintah Soviet mengecam deportasi yang dilakukan rezim Stalin dan mengakui orang Korea, Jerman, Karachay, Kalmyk, Chechnya, Ingush, Balkar, Tatar Krimea, Turki Meskheta, Yunani, dan Kurdi sebagai “Bangsa-Bangsa yang Ditindas” (“Repressed Peoples”).

Dengan demikian, setelah melalui kategori “bangsa kecil”, “kebangsaan yang terbelakang secara budaya”, dan “bangsa musuh”, redefinisi orang Kurdi di bekas Uni Soviet berakhir dengan konsep “bangsa yang ditindas” (“repressed people”).

Kurdi di Era Baru (Abad 20 - 21): Prospek dan Tantangan

Abad kedua puluh menyaksikan munculnya Turkye, Iran, Irak, dan Suriah modern, yang secara tidak sengaja mengakibatkan terpecahnya bangsa Kurdi, kelompok etnis terbesar keempat di Timur Tengah, menjadi kelompok-kelompok minoritas di negara-negara yang baru terbentuk tersebut. Pemerintah-pemerintah pusat yang didominasi oleh elite politik Turkye, Persia, dan Arab menganggap Kurdi sebagai hambatan dalam membentuk identitas mono-nasionalis dan menggunakan langkah-langkah diskriminatif serta asimilasionis yang keras untuk menundukkan tantangan nyata maupun potensial dari Kurdi. Sementara itu, Kurdi menolak dan memberontak terhadap kebijakan-kebijakan represif yang bertujuan menghapus identitas Kurdi dan melakukan puluhan pemberontakan bersenjata melawan pemerintah mereka sepanjang abad kedua puluh, dan upaya mereka untuk menegosiasikan status yang lebih baik dengan bangsa-bangsa dominan tersebut mengalami kegagalan. Sejarah berdarah dan penuh kegagalan pada abad yang lalu ini melahirkan ungkapan yang banyak dikutip bahwa “Kurdi tidak memiliki sahabat selain pegunungan”, merujuk pada pengkhianatan dan janji-janji yang dilanggar.

Ketika Timur Tengah mengalami perubahan besar, banyak pihak menunjuk pada berakhirnya Perjanjian Sykes-Picot yang satu abad lalu melahirkan negara-negara Timur Tengah modern yang memiliki fondasi rapuh. Irak dan Suriah merupakan dua negara tersebut dan menjadi tempat tinggal bagi populasi minoritas Kurdi yang cukup besar. Negara-negara ini terpecah berdasarkan garis etnis dan sektarian serta menghadapi tantangan serius dari aktor-aktor sub-negara. Yang penting, “di tengah perubahan yang tiba-tiba dan dramatis ini, Kurdi yang sebelumnya terpinggirkan menjadi sentral dan relevan secara geopolitik karena kepentingan mereka sejalan dengan kepentingan kekuatan-kekuatan Barat”. Dengan perubahan-perubahan penting ini, pergantian menuju abad kedua puluh satu telah membawa Kurdi ke garis depan politik regional dan global serta menumbuhkan rasa optimisme yang semakin besar, yang digambarkan sebagai “lompatan kuantum” bagi Kurdi. Meskipun perubahan dramatis yang terjadi di Timur Tengah menawarkan peluang penting bagi perjuangan Kurdi selama satu abad untuk memperoleh pengakuan, berbagai hambatan serius tampaknya terus muncul kembali setiap kali Kurdi di mana pun mengalami kemajuan. Wilayah geografis Kurdi yang luas, membentang dari Iran bagian barat hingga dekat Laut Mediterania, serta satu abad penindasan dan penyangkalan telah melahirkan berbagai macam kelompok Kurdi dengan pandangan dan tujuan yang saling bersaing dan terkadang bertentangan. Kemitraan Kurdi–Amerika Serikat selama dan setelah Perang Teluk Pertama pada 1990-an membantu menciptakan otonomi Kurdi secara de facto di Irak bagian utara yang dilindungi oleh “zona larangan terbang” (“no-fly zone”). Dengan invasi Amerika Serikat ke Irak pada 2003, situasi ini semakin diperkuat dan memperoleh pengakuan resmi dalam konstitusi Irak tahun 2005. Kurdistan Regional Government (KRG) di Irak menghadapi sejumlah tantangan domestik dan regional yang serius, tetapi tetap berhasil muncul sebagai sebuah entitas politik dengan tingkat pengakuan internasional tertentu.

Dimulainya perang saudara Suriah pada 2011 menciptakan keadaan serupa bagi kelompok-kelompok Kurdi di Suriah yang sebelumnya sebagian besar tidak dikenal. Partai Persatuan Demokratik Kurdi (Partiya Yekitiya Demokrat, PYD) dan sayap-sayap bersenjataanya, Unit Perlindungan Rakyat (Yekîneyên Parastina Gel, YPG) serta Unit Perlindungan Perempuan (Yekîneyên Parastina Jin, YPJ), muncul sebagai mitra paling efektif Amerika Serikat di lapangan dalam perjuangan melawan Negara Islam (IS, yang juga dikenal sebagai ISIS). Kemitraan militer ini berkembang ketika Pasukan Demokratik Suriah (Syrian Democratic Forces/SDF) yang dipimpin PYD menjadi sekutu jangka panjang yang semakin tidak tergantikan dalam mengakhiri perang saudara Suriah yang sedang berlangsung dan menahan kelompok-kelompok Islamis serta Iran. Terlepas dari tantangan yang dihadapi pemerintahan yang dipimpin Kurdi tersebut di kawasan yang dilanda ketidak-stabilan dan perang, pemerintahan itu semakin menjadi bagian dari keseluruhan strategi Amerika Serikat dalam menghadapi Iran dan mengalahkan pemberontakan kelompok-kelompok Islamis di kawasan tersebut. Di sisi lain perbatasan, di Turki, terdapat populasi Kurdi terbesar di dunia, tetapi Kurdi di sana tidak pernah berhasil membentuk bahkan periode otonomi yang singkat sekalipun—seperti Republik Kurdistan di Iran pada 1940-an—apalagi otonomi *de facto* yang lebih bertahan lama—seperti yang dinikmati Kurdi Irak dari 1991 hingga 2003 dan Kurdi Suriah setelah 2012—atau otonomi yang diakui secara resmi—seperti Kurdi Irak setelah 2003. Di Turki, pemberontakan bersenjata Partai Pekerja Kurdistan (Partiya Karkerên Kurdistan, PKK) telah mengalami pasang surut sejak 1978.

Abad kedua puluh satu menandai era baru bagi gerakan Kurdi di Turki. Dengan ditangkapnya pemimpin PKK, Abdullah Öcalan, pada 1999, kelompok militan tersebut menyatakan gencatan senjata sepihak dan menarik unit-unit gerilyanya ke pangkalan mereka di Pegunungan Qandil di Irak bagian utara. Kelompok tersebut juga mulai mengalami transformasi yang nyata dan luas. Selama dekade berikutnya, transformasi strategis ini terbukti menjadi “wacana demokratis yang komprehensif” yang mengubah “tujuan jangka panjang gerakan tersebut dan tuntutan politiknya bagi bangsa Kurdi”. Dengan menekankan konsep-konsep seperti “otonomi demokratis”, gerakan tersebut meninggalkan tujuan awalnya untuk membentuk negara Kurdi sosialis yang merdeka dan mulai mencari solusi politik di dalam Turki, bukan memisahkan diri darinya. Terlepas dari berbagai kemajuan signifikan bagi Kurdi di Irak, Suriah, dan Turki, secara berurutan, pergantian abad belum membawa perubahan yang berarti bagi Kurdi di Iran. Hal ini “ironis”, karena Republik Kurdi Mahabad yang berumur pendek pada 1946 di wilayah Iran saat ini “memberikan kepada Kurdi partai politik modern pertama mereka, simbol-simbol nasional seperti bendera dan lagu kebangsaan”. Hal ini sebagian disebabkan oleh kenyataan bahwa sementara pergantian abad menyaksikan perubahan dramatis di negara-negara tetangga, Irak, Suriah, dan Turki, bagi Iran periode tersebut justru bertepatan dengan konsolidasi kekuasaan negara setelah perang panjang dan menghancurkan dengan Irak. Salah satu perkembangan paling signifikan di Iran pada abad kedua puluh satu berkaitan dengan munculnya aktor baru, yaitu Partai Kehidupan Bebas Kurdistan (Partiya Jiyanê Azadê Kurdistan, PJAK), sebuah partai yang mengadopsi model PKK di Turki. Selain itu, terdapat tanda-tanda bahwa partai-partai dan kelompok-kelompok lama, yaitu Partai Demokrat Kurdistan Iran (Kurdistan Democratic Party of Iran, KDPI) dan Organisasi Pejuang Revolusioner Kurdistan Iran (Organization of Revolutionary Toilers of Iranian Kurdistan, Komala), berusaha merebut kembali kepemimpinan politik maupun militer di antara masyarakat Kurdi di Iran.

Optimisme Kurdi dan Internasionalisasi Persoalan Kurdi

Gerakan separatistis etnonasionalis (pandangan bahwa sebuah bangsa terutama ditentukan oleh kesamaan etnis, budaya, bahasa, asal-usul) memiliki dimensi internal maupun internasional. Meskipun “pada umumnya munculnya separatisme dapat dijelaskan dalam kerangka politik domestik”, keberhasilan atau hasil akhirnya sebagian besar merupakan fungsi dari faktor-faktor eksternal, seperti melemahnya atau runtuhnya pemerintah pusat atau intervensi asing untuk mendukung kelompok separatistis. Meskipun rezim internasional dan prinsip non-keterlibatan cenderung membatasi keterlibatan eksternal, dukungan asing terhadap kelompok-kelompok separatistis sering terjadi dan kerap menjadi faktor penentu dalam keberhasilan atau kegagalan pemisahan diri.

Di antara aktor-aktor non-negara yang telah dihasilkan oleh Timur Tengah yang terpecah-belah, Kurdi telah muncul sebagai kekuatan paling efektif dan, dapat dikatakan, satu-satunya kekuatan yang memiliki ideologi sekuler, yang menghasilkan kemitraan yang belum pernah terjadi sebelumnya dengan Amerika Serikat. Apa yang selama ini menjadi hambatan utama bagi keinginan Kurdi untuk memperoleh pengakuan—“bahwa persoalan mereka terlalu besar untuk diselesaikan, tetapi tidak cukup besar untuk menjadi perhatian utama komunitas internasional”, mulai berubah, seiring dengan gagalnya status quo atau melemahnya sistem negara di Timur Tengah. Pada titik ini, keberadaan Amerika Serikat yang terbuka tanpa batas waktu di Suriah dan Irak, serta ketergantungannya yang besar pada kelompok-kelompok Kurdi di negara-negara tersebut untuk mencapai tujuan-tujuan strategisnya, telah secara fundamental mengubah prospek Kurdi. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Rex Tillerson mengumumkan pada Januari 2018 bahwa “Suriah tetap menjadi sumber ancaman strategis yang serius” untuk membenarkan rencana Amerika mempertahankan kehadiran jangka panjang di Suriah. Rencana ini tampaknya memiliki tiga dimensi. Pertama, rencana tersebut ditujukan untuk memberantas Islam radikal, terutama IS dan al-Qaeda, melalui kemitraan dengan sekutu Kurdi dan Arab, yaitu Pasukan Demokratik Suriah (Syrian Democratic Forces, SDF), untuk menstabilkan bagian-bagian negara yang berada di bawah kendali SDF. Kedua, melalui para sekutunya di lapangan, Amerika Serikat bermaksud mendorong solusi politik terhadap perang di Suriah. Ketiga, “ancaman strategis yang berkelanjutan”, tidak terbatas pada tujuan yang relatif terbatas berupa pemberantasan terorisme Islam dan stabilisasi Suriah. Dengan merujuk pada meningkatnya pengaruh Iran di Irak dan Suriah, Amerika Serikat melihat aliansi erat dengan SDF yang dipimpin Kurdi sebagai hal yang penting untuk membendung pengaruh Iran di Timur Tengah. Kemampuan bertempur, kesiapan, dan kemenangan akhir Kurdi melawan IS, ditambah dengan cita-cita progresif mereka, telah membuat mereka memperoleh perhatian media internasional yang cukup besar. Selain keberhasilan mereka dalam mengelola wilayah-wilayah mereka dalam situasi kacau akibat perang saudara Suriah. Dengan perlengkapan yang terbatas tetapi memiliki disiplin yang tinggi serta keyakinan yang kuat, pasukan Kurdi melakukan pertahanan gigih dan pada akhirnya berhasil mempertahankan Kobane, yang oleh sejarah akan dipandang sebagai saat ketika arus berbalik melawan IS, yang hingga saat itu tampak hampir tidak terkalahkan. Dengan demikian, gambaran negatif mengenai Kurdi sebagai “teroris”, “ancaman”, atau “gangguan” terhadap stabilitas kawasan yang selama ini dikemukakan oleh pemerintah di Ankara, Teheran, Baghdad, dan Damaskus tidak lagi diterima begitu saja oleh masyarakat di Barat.

Pandangan Manikeanisme (ajaran keagamaan yang didirikan oleh Mani, seorang tokoh religious dari Persia pada abad ke-3 Masehi) era Perang Dingin, yang menghasilkan dukungan hampir tanpa pertanyaan terhadap negara Turkeye dalam menekan atau menenangkan pemberontakan Kurdi di sana, sebagian besar telah terkikis. Sebaliknya, citra positif yang pernah dimiliki Turkeye di bawah elite sekuler yang pro-Barat telah sangat tercoreng. Ketika militer Turkeye melakukan serangan terhadap YPG Kurdi di kantong Kurdi Afrin di barat laut Suriah, respons resmi Eropa dan Amerika sebagian besar terukur dan terutama ditujukan untuk mendesak Turkeye membatasi operasinya serta menunjukkan sikap menahan diri. Namun, media Barat pada umumnya mengecam Turkeye. Bagaimanapun juga, “soft power” yang dimiliki Turkeye ketika negara tersebut dapat dianggap sebagai negara Muslim yang paling sekuler dan demokratis di bawah elite Kemalis telah terkuras, karena negara tersebut semakin menganut kebijakan yang Islamis dan otoriter. Soft power adalah kemampuan suatu aktor untuk “memengaruhi pihak lain melalui daya tarik dan persuasi, bukan melalui kekuatan keras berupa paksaan. Soft power suatu negara terutama bergantung pada tiga sumber: budayanya, nilai-nilai politiknya, dan kebijakan luar negerinya.

Ketika Turkeye di bawah Erdoğan semakin menjauh dari blok Barat, semakin meninggalkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip demokrasi, tampil sebagai pelindung dan pendukung kelompok-kelompok Islamis, serta memiliki kepentingan yang semakin berbeda dengan Barat di Suriah dan di luar Suriah, kecil kemungkinan Turkeye akan memperoleh dukungan yang sama seperti yang pernah diterimanya selama era Perang Dingin. Perang Turkeye melawan tuntutan Kurdi untuk memperoleh kesetaraan dan pengakuan semakin menjadi persoalan yang ambigu secara moral, dengan kata lain, Turkeye “kalah dalam narasi” melawan Kurdi. Presiden Prancis Emmanuel Macron menggambarkan mitranya, Presiden Turkeye Erdoğan, sebagai “anti-Eropa”, yang nilai-nilai dan prinsip-prinsipnya tidak sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip Uni Eropa. Turkeye di bawah Erdoğan, lanjutnya, “bukanlah Turkeye pada masa Presiden Kemal”, merujuk kepada pendiri republik sekuler tersebut.

Alasan Pesimisme: Perpecahan Kurdi dan Realitas Geopolitik

Meskipun narasi “anti-Kurdi” pada abad kedua puluh menggambarkan Kurdi sebagai teroris, pembuat masalah, dan pengacau mulai memudar selama satu dekade terakhir, stigma terhadap agenda “etnonasionalis” belum hilang. Kurdi di Irak menghadapi cemoohan karena menginginkan negara Kurdi mereka sendiri. Bahkan gerakan Kurdi di Turkeye dan Suriah, yang wacana “otonomi demokratis”-nya secara tegas menolak nasionalisme dan negara itu sendiri, tetap dituduh melakukan “separatisme” dan nasionalisme eksklusif. Para pengkritik Kurdi tampaknya berasumsi bahwa negara-negara yang ada—Republik Turkeye, Republik Arab Suriah, Republik Islam Iran, dan Irak—telah dan masih merupakan negara bagi “seluruh rakyatnya”. Kenyataannya, negara-negara tersebut, dengan kemungkinan pengecualian sebagian terhadap Irak kontemporer, mengecualikan Kurdi dan kelompok-kelompok minoritas lainnya. Mereka melakukannya melalui nama-nama resmi (seperti Republik Arab Suriah), simbol-simbol, pelarangan bahasa Kurdi, narasi nasional, serta monopoli atas kekuasaan politik dan ekonomi. Pada saat yang sama, para penentang tampaknya berasumsi bahwa sebuah negara Kurdistan akan menjadi negara yang hanya ada untuk kepentingan Kurdi—sementara Turkeye, Republik Islam Iran, atau Republik Arab Suriah dapat menjadi negara bagi seluruh kelompok etnis dan agama mereka.

Para pendukung status quo tidak melihat persoalan ketika Kurdi menjadi minoritas di negara-negara tersebut, tetapi mereka berpendapat bahwa orang Arab, Turkmen, Kristen, atau kelompok lainnya akan menghadapi persoalan yang tidak dapat diterima jika menjadi minoritas dalam sebuah negara Kurdi. Ketika Kurdi di Irak menyelenggarakan referendum mengenai kemerdekaan pada September 2017, mereka akhirnya mendapati diri mereka tanpa dukungan internasional, selain beberapa pernyataan retorik dari Israel. Terjepit di antara Turkeye, Suriah, Iran, dan Irak di bawah Baghdad, mereka segera menghadapi ancaman embargo dan sanksi dari negara-negara tetangga. Ketika Baghdad mengerahkan tentara Irak dan milisi Syiah pro-Iran ke utara untuk merebut kembali Kirkuk dan wilayah-wilayah sengketa lainnya, Amerika menyatakan netralitasnya dan tetap membiarkan hal tersebut terjadi. Presiden AS Trump menyatakan bahwa “kami tidak memihak, tetapi kami tidak menyukai kenyataan bahwa mereka saling berkonflik”. Wilayah Kurdistan Irak tidak diragukan lagi merupakan bentuk otonomi yang paling bertahan lama dan yang paling mendekati kemerdekaan bagi bagian mana pun dari Kurdistan. Namun, perpecahan yang terus berlangsung di dalam wilayah tersebut serta berbagai tingkat pemerintahan yang tidak berfungsi dan korupsi telah sedikit banyak mencoreng aspirasi Kurdi dalam beberapa tahun terakhir. Sementara sumber daya minyak dan gas di wilayah Kurdistan Irak dapat memberikan basis keuangan bagi kemerdekaan, sumber daya tersebut juga dapat mendorong munculnya “kutukan sumber daya” (“resource curse”) berupa rentierisme dan korupsi.

Meskipun kepentingan Amerika Serikat dalam memerangi IS, membendung Iran, dan tetap relevan dalam penyelesaian perang saudara Suriah saat ini membuat pasukan Amerika dan kerja sama mereka dengan PYD/SDF tetap bertahan (meskipun mendapat keberatan keras dari Turkeye), suatu hari Amerika kemungkinan akan meninggalkan Suriah. Turkeye, rezim Ahmed al-Sharaa, Irak, dan Iran, bersama dengan berbagai kelompok jihad yang berasal dari kawasan tersebut, akan tetap berada di wilayah itu setelah penarikan tersebut. Oleh karena itu, tantangan bagi Kurdi Suriah adalah membangun kekuatan mereka secara memadai untuk mengatasi isolasi geopolitik mereka sebelum Amerika meninggalkan Suriah. Mereka hanya perlu mengembangkan kekuatan, hubungan dengan dunia luar, dan sumber daya lainnya yang cukup untuk mencegah musuh-musuh mereka melakukan tindakan terhadap mereka. Jika mengerahkan upaya yang diperlukan untuk menekan Kurdi—seperti yang terjadi sepanjang abad kedua puluh—terbukti terlalu mahal, maka ruang bagi keberlangsungan kekuatan politik Kurdi akan terbuka oleh Revolusioner baru.

Penutup

Sifat lintas batas yang tidak dapat disangkal dari persoalan Kurdi, keterisolasian wilayah Kurdi dan rendahnya tingkat pembangunan sosial-ekonomi, telah lama menjadi hambatan dalam pembentukan ruang Kurdi yang bersatu atau “komunitas yang dibayangkan”. Tanah air Kurdi terdiri atas pegunungan yang “tidak dapat dilalui”, yang secara historis berfungsi sekaligus sebagai tempat perlindungan maupun sebagai hambatan bagi munculnya gerakan Kurdi yang bersatu.

Perubahan teknologi dan integrasi wilayah Kurdi ke dalam perekonomian global terutama karena cadangan minyak dan gas alamnya yang sangat berharga, serta perubahan dramatis yang dihasilkan oleh konflik selama puluhan tahun, kemungkinan besar akan mengimbangi dampak negatif geografis yang sebelumnya ada. Lebih jauh lagi, kenyataan transnasional persoalan Kurdi mungkin justru berfungsi sebagai fasilitator, bukan hambatan, bagi perjuangan Kurdi. Penyebaran kelompok-kelompok etnis lintas batas terbukti menjadi faktor penting dalam memulai dan mempertahankan perang. Penyebaran tersebut juga dapat membantu meningkatkan biaya perang bagi pemerintah dan memberikan insentif bagi penyelesaian konflik secara damai yang menguntungkan pihak pemberontak. Penentangan terhadap kelayakan negara Kurdi adalah adanya perpecahan di antara masyarakat Kurdi.

Terdapat perbedaan penting di antara Kurdi. Tidak semua Kurdi berbicara dalam dialek bahasa Kurdi yang sama, meskipun mayoritas Kurdi menganut Islam Sunni, sebagian masyarakat Kurdi beragama Syiah, Alevi, Yezidi, atau menganut kepercayaan-kepercayaan minoritas lainnya. Hal ini bukanlah sesuatu yang unik dalam kasus Kurdi dan juga bukan sesuatu yang mengejutkan. Kenyataannya, mengingat penaklukan Kurdi selama satu abad oleh rezim dan masyarakat yang bermusuhan, yurisdiksi politik, ekonomi, dan militer yang berbeda-beda, yang tercipta akibat pembagian Kurdi di antara empat negara yang berbeda, merupakan kunci untuk memahami perpecahan dan faksi-faksi di antara kelompok-kelompok Kurdi. Terlepas dari perbedaan-perbedaan tersebut dan perselisihan di antara para elite, Kurdi tidak lebih tidak siap dibandingkan bangsa Arab tetangga mereka, yang berhasil—terutama karena keselarasan kepentingan kekuatan-kekuatan besar dengan kepentingan mereka pada era pasca-Perang Dunia I—membentuk hampir dua lusin negara Arab di Timur Tengah.

Wilayah geografis dan populasi Kurdi yang luas memungkinkan terbentuknya lebih dari satu entitas politik Kurdi, bagaimanapun bentuknya dibayangkan. Dengan demikian, hasil perjuangan Kurdi untuk menentukan nasib sendiri kemungkinan besar akan dibentuk oleh intervensi atau mediasi eksternal. Pada titik ini, kehadiran Amerika Serikat di Suriah dan Irak akan memainkan peran penting dalam menentukan nasib Kurdi. Meskipun Amerika Serikat ragu-ragu untuk berkomitmen pada perjuangan Kurdi, kehadirannya di kawasan tersebut tampaknya bukan untuk jangka pendek dan juga tidak didorong oleh alasan-alasan altruistik. Sebaliknya, merupakan kepentingan Amerika Serikat untuk membendung Islamisme radikal, mencegah munculnya kekuatan Iran yang dengan mudah dapat membentang dari Teheran hingga Beirut, dan memainkan peran penting dalam peta geopolitik Timur Tengah yang sedang berkembang. Meskipun perkembangan-perkembangan ini tidak memungkinkan solusi cepat dan memerlukan pendalaman hubungan Amerika-Kurdi di Irak dan Suriah, perubahan yang terjadi di Turkye juga tidak kalah penting. Kemerosotan cepat Turkye menuju otoritarianisme Islamis kemungkinan akan mengubah gerakan Kurdi di Turkye menjadi sekutu dalam perjuangan untuk mempertahankan aspek sekuler dan demokratis negara tersebut.

Dalam Turkye pasca-Erdoğan yang terpecah dan terpolarisasi, Kurdi kemungkinan akan memainkan peran penting dalam rezim yang sedang berkembang. Baik di Irak maupun Turkye, banyak orang Kurdi menyatakan keinginan mereka untuk melihat Kurdistan yang merdeka di bagian mana pun dari tanah leluhur mereka. Orang Kurdi Irak telah menikmati kemerdekaan secara *de facto* sejak 1991.

Wilayah otonom Kurdistan Irak, yang dilindungi oleh Amerika, sering digambarkan oleh orang Kurdi sebagai “*Irak yang lain*”. Wilayah ini merupakan suatu eksperimen yang menarik di Timur Tengah, meskipun menghadapi korupsi yang mengakar, tingkat pengangguran yang tinggi, rendahnya investasi asing, tingginya tingkat emigrasi ke Barat, serta aktivitas militer Turkye. Orang Kurdi Irak menyadari kelemahan ekonomi mereka. Mereka menganggap akses terhadap ladang minyak Kirkuk sebagai satu-satunya cara untuk menciptakan negara yang merdeka dan mandiri secara ekonomi. Namun, untuk saat ini hal tersebut tidak mungkin. Turkye tidak dapat menerima solusi seperti itu, yang pada akhirnya akan mengakibatkan munculnya kembali peperangan dan pertumpahan darah. Negara Kurdi yang lahir dalam keadaan seperti itu akan menjadi sangat terisolasi dan tidak siap untuk menjalani kehidupan sebagai negara yang merdeka.

Kesimpulan

Sejak invasi Prancis ke Mesir pada tahun 1798 hingga pecahnya Perang Besar pada tahun 1914, modernitas Eropa Barat juga ditegakkan dengan todongan senjata, secara radikal membentuk kembali Timur Tengah. Inggris, Prancis, Rusia, dan kemudian Jerman terus-menerus bersaing untuk meningkatkan bagian mereka di Timur Tengah. Para elite dan masyarakat biasa secara aktif terlibat dalam memanfaatkan sarana yang tersedia untuk kepentingan mereka sendiri. Namun demikian, pandangan yang seimbang mengenai periode tersebut tidak seharusnya tetap berada dalam dikotomi antara yang dijajah dan penjajah. Penelitian-penelitian mutakhir mengenai iklim di Timur Tengah pada abad kesembilan belas sangat memberikan pencerahan, karena penelitian tersebut mengarahkan perhatian pada pendekatan yang menjauh dari anakronisme (tidak sesuai dengan zamannya) nasionalistis dan antroposentris (menempatkan manusia sebagai pusat perhatian).

Setelah Perang Dunia I, elite Kurdi yang semakin banyak memperoleh pendidikan Barat menyuarakan tuntutan budaya dan politik Kurdi, yang tidak menghasilkan munculnya negara-bangsa Kurdi setelah Perang Dunia I. Sejauh periode antar-perang merupakan proses pembentukan negara dan bangsa di Turkye, Iran, dan Irak, bagi orang Kurdi, pada hakikatnya, periode tersebut merupakan proses “penghancuran bangsa” (“nation-destroying”), yang diwujudkan melalui sentralisasi, modernisasi, asimilasi, “peradaban”, dan kolonisasi. Dalam proses ini, orang Kurdi merupakan objek dan subjek sekaligus musuh dan sekutu. Selain itu, mereka sama sekali tidak bersatu. Meskipun mengalami penghancuran dan fragmentasi, periode antar-perang tetap menjadi titik rujukan politik dan historis utama dalam hampir setiap pembahasan mengenai orang Kurdi.

Orang Kurdi telah belajar dari pengalaman pahit masa lalu dan karena itu, kini tidak lagi terlalu terbuka terhadap intervensi maupun bantuan dari kekuatan luar, karena bantuan semacam itu hampir selalu berakhir buruk. Dalam situasi saat ini, bentuk bantuan terbaik yang dapat diharapkan orang Kurdi bukanlah bantuan rahasia atau operasi terselubung yang justru membuat mereka rentan terhadap risiko, melainkan kebijakan “*open door*”, yaitu secara terbuka mengaitkan persoalan minoritas dalam setiap perundingan. Dengan cara ini, seluruh pihak mengetahui agenda yang dibicarakan dan dialog yang jelas dapat dibangun. Sudah saatnya komunitas internasional menyadari bahwa orang Kurdi mampu menentukan kebutuhan mereka sendiri dan menemukan cara untuk menyelesaikan persoalan mereka.

Yang dibutuhkan sekarang adalah mendengarkan mereka, menanggapi aspirasi mereka secara serius, dan memberikan dukungan ketika diperlukan, bukan mendikte apa yang menurut pihak luar mereka butuhkan. Dengan pendekatan demikian, peluang untuk mencapai solusi politik yang berkelanjutan di kawasan akan menjadi lebih besar. Penyelesaian persoalan Kurdi tidak hanya akan menentukan masa depan masyarakat Kurdi, tetapi juga memiliki implikasi yang jauh lebih luas terhadap stabilitas politik, hubungan antarkelompok, demokrasi, hak asasi manusia, dan keamanan seluruh kawasan Timur Tengah.

Saat ini, tidak ada pihak yang berkepentingan untuk menciptakan negara Kurdi yang merdeka di Timur Tengah maupun di tempat lain di dunia. Dalam hubungan internasional kontemporer, wilayah dan kedaulatan masih merupakan nilai-nilai penting bagi setiap negara. Wacana separatis yang terus berlanjut hanya akan meningkatkan tekanan internal terhadap populasi Kurdi di Turki, Irak, Iran, dan Suriah.

(*) Kekaisaran Sasania (Sasanian Empire) adalah kekaisaran Persia besar yang berkuasa dari 224 hingga 651 M, dan merupakan kekuatan utama Timur Tengah sebelum munculnya kekhalifahan Islam. Dalam sejarah Persia, Sasania sering dianggap sebagai kekaisaran Persia terakhir sebelum penaklukan Arab-Muslim.

@) Kesultanan Seljuk merupakan salah satu dinasti Muslim Turki paling penting dalam sejarah Timur Tengah dan menjadi jembatan penting antara dunia Turki, Persia, dan Islam. Dinasti ini juga sangat terkait dengan munculnya Kesultanan Seljuk Agung dan kemudian perkembangan Kesultanan Rum di Anatolia.

(**) Kekaisaran Utsmaniyah (Ottoman Empire) adalah salah satu kekaisaran terbesar dan terlama dalam sejarah dunia. Kekaisaran ini berdiri sekitar 1299–1922, selama lebih dari 600 tahun, dan pada masa kejayaannya menguasai wilayah yang sangat luas di Eropa Tenggara, Asia Barat, Afrika Utara, dan Laut Mediterania. Nama "Utsmaniyah" berasal dari pendirinya, Osman I (Utsman I).

#) Pegunungan Zagros berada di Asia Barat, membentang di Iran, Irak, Turkye. Pegunungan ini sangat penting dalam sejarah karena wilayah di sekitarnya termasuk Kawasan Bulan Sabit Subur dan merupakan salah satu wilayah awal domestikasi tanaman dan hewan.

(+) DNA adalah singkatan dari Deoxyribonucleic Acid atau dalam bahasa Indonesia Asam Deoksiribonukleat. Secara biologis, DNA adalah materi genetik yang menyimpan informasi yang menentukan karakteristik dan fungsi suatu organisme.

Jakarta, 22 Agustus 2026

Referensi:

1. The Kurdish in Iraq, The Past, Present and Future, Kerim Yildiz, Revided Edition, Pluto Press, 2007
2. The Kurds in Iran, The Past, Present and Future, Kerim Yildiz and Tanyel B, First Published, Taysi, Pluto Press, 2007
3. War and Peace in Kurdistan, Perspective for a Political Solution of the Kurdish Question, Abdullah Ocalan, Third Edition, Published by: International Initiative, Cologne, 2012
4. A Modern History of The Kurds, David McDowall, Fourth Edition, I.B. Tauris, May 2020
5. The Cambridge History of The Kurds, Edited by Hamit Bozarlan, Cengizgunes, Veliyadirgi, Cambridge University Press, 2021